



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANAS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI YUNIARTO
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG SOSIAL BUDAYA
3. NHK : 800817

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **7.550.000.000**

1. Tanah Seluas 1086 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 2.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 2.200.000.000
3. Tanah Seluas 478 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 507 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **779.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
2. MOBIL, MERCEDES C-CLASS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF 83 Tahun 2002, WARISAN Rp.
25.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000



7. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000

8. LAINNYA, MITSUBISHI FN 527 ML Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 400.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.224.295.293

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.953.295.293

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.953.295.293

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.